

**JSKK** Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga korban  
**Jl. Bonang 1A, Menteng, Jakarta Pusat 12870, Telp. 021-3913473**  
(Aksi Diam di Depan Istana Presiden, Kamis ke-52)

No. : 25/Surat Terbuka JSKK/2/08.  
Hal : **Komitmen Presiden dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM),  
dan Penolakan Gelar Pahlawan kepada Soeharto.**

Kepada Yth.  
Bapak Presiden Republik Indonesia  
**Susilo Bambang Yudhoyono**  
di Jakarta.

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami korban dan keluarga korban pelanggaran HAM mengingatkan bahwa Bapak adalah Presiden Pertama RI yang dipilih rakyat secara langsung, di masa reformasi telah bergulir. Harapan kami semula, agenda reformasi akan segera diwujudkan termasuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun harapan itu kini ibarat isapan jempol, karena hingga masa pemerintahan Bapak melewati separuh waktu, di mana sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 tinggal 620 hari, tidak tampak adanya gelagat untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga timbul pertanyaan kami: Adakah komitmen Bapak Presiden dalam penegakan HAM?; dan lebih spesifik lagi: *Quo vadis*, akan (di)kemana(kan), kasus pelanggaran HAM masa lalu?

Sejak Soeharto lengser, empat pemerintahan telah silih berganti. B.J. Habibie yang dikenal sebagai bablasan Orde Baru, menerbitkan sejumlah undang-undang seputar HAM yang ternyata hanya sekedar kamufase seakan-akan negeri ini memperhatikan penegakan HAM; Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengkondisikan adanya geliat penyelidikan, penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ke arah sidang pengadilan. Tetapi geliat itu kemudian surut bersamaan dengan kelengsernya dari kursi kepresidenan; Megawati Soekarnoputri tidak punya greget untuk meneruskan semangat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan kini, dalam pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejarah berulang tak jauh berbeda dengan pemerintahan B.J. Habibie. Lobby ke luar negeri lebih dominan, hanya untuk menciptakan citra seakan-akan pemerintah Indonesia memperhatikan penegakan HAM. Padahal niat Pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih dipertanyakan.

Tingkat pelanggaran HAM yang begitu tinggi di masa pemerintahan Ode Baru dan bablasan Orde Baru, baik yang menyangkut hak sipil dan politik maupun hak sosial, ekonomi dan budaya, tak lepas dari peranan mantan Presiden Soeharto sebagai inspiratornya yang kemudian diikuti oleh para kroninya. Meski demikian, dengan ajalnya Soeharto tidak berarti semua kasus pelanggaran HAM di negeri ini hapus dengan sendirinya. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para kroni dan loyalis Soeharto harus segera diselesaikan melalui proses hukum.

Seiring dengan pandangan tersebut dan sebagai simpul dari surat singkat ini, kami sampaikan desakan kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai berikut:

- (1) Melakukan reorientasi atas berbagai kegagalan penegakan hukum dan HAM yang berlangsung selama ini, dan segera berpaling ke arah penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui proses hukum.
- (2) Membangun komitmen penegakan HAM dengan mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan.
- (3) Mengadili seluruh kroni, loyalis, dan keluarga Soeharto yang diduga telah menghimpun kekayaan secara “haram” dan telah melakukan pelanggaran HAM baik yang menyangkut hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.
- (4) Mengambil alih aset dan kekayaan yayasan-yayasan Soeharto.
- (5) Menolak pemutihan dosa-dosa Soeharto terhadap rakyat Indonesia, dan sekaligus menolak pemberian maaf dan gelar pahlawan kepadanya.

Demikian maksud surat kami kali ini, dan terimakasih atas perhatiannya.

Jakarta, 7 Februari 2008.

**Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga korban (JSKK),**

(Suciwati)

(Sumarsih)

(Bedjo Untung)

TEMBUSAN:

1. Kepada Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Kepada Yth. Bapak Ketua Komnas HAM.